Daftar Periksa untuk Mengakhiri Tirani

THE CHECKLIST FOR ENDING TYRANNY

PETER ACKERMAN DAN HARDY MERRIMAN

FROM THE BOOK: *IS AUTHORITARIANISM STAGING A COMEBACK*
EDITORS: MATHEW BURROWS AND MARIA STEPHAN
THE ATLANTIC COUNCIL, 2015
TRANSLATION: JPD SYSTEMS, OCTOBER 2017

© 2014 Peter Ackerman dan Hardy Merriman

Daftar Periksa untuk Mengakhiri Tirani

Oleh Peter Ackerman dan Hardy Merriman

Dewasa ini, konflik-konflik paling mematikan di dunia tidak terjadi dalam konteks antar-negara, melainkan di dalam lingkup sebuah negara yang mengadu sang tiran dan rakyat yang ia tindas. Rakyat tertindas dipercaya luas hanya memiliki dua pilihan: tunduk pada tirani, pada penindasan politik, dengan harapan kondisi politik akan pelan-pelan membaik, atau melancarkan perlawanan yang penuh kekerasan untuk meraih kembali kebebasan politik. Pandangan terbatas ini tidak dicerminkan oleh kenyataan bahwa perlawanan sipil, yang juga sering disebut sebagai gerakan *people power* atau konflik tanpa kekerasan, telah terjadi jauh lebih sering daripada yang disangka. Sejak dekade 1990-an, rata-rata satu pembangkangan sipil besar berlangsung melawan penguasa tiap tahunnya.[1] Perlawanan-perlawanan yang dipimpin warga negara sendiri ini telah terbukti semakin menentukan arah perkembangan konflik-konflik dan berbagai transisi menuju demokrasi yang paling signifikan sejak tahun 1972.[2] Akan tetapi, para pembuat kebijakan, peneliti, wartawan dan pengamat politik lain terus meremehkan kapasitas masyarakat biasa dalam membangkang melawan tirani dan menggapai hak politik tanpa kekerasan.

Sebuah Titik Buta dalam Analisis

Pemberontakan di Tunisia dan Mesir pada tahun 2011, dan baru-baru ini di Ukraina pada tahun 2014, adalah beberapa contoh bagaimana perlawanan sipil di tingkat akar rumput dapat mengejutkan khalayak ramai dengan kekuatan dan potensi transformatifnya. Tidak ada yang meramalkan berkobarnya pemberontakan ini, tapi hal ini tidak menjadikan mereka unik. Sedikit, kalau pun ada, yang dapat meramalkan berbagai Revolusi Warna di Serbia (2000), Georgia (2003) dan Ukraina (2004). Beberapa dekade sebelumnya, tidak ada yang mengira perlawanan terorganisasi dan tanpa kekerasan dapat berperan penting dalam menjatuhkan diktator Filipina Ferdinand Marcos (1986), diktator Chile Augusto Pinochet (1988), rezim Soviet di Polandia (1989), atau pun rezim Apartheid di Afrika Selatan (1992).

Seiring pergumulan para ahli internasional dan regional dalam menjelaskan berbagai konflik ini, baik tanpa kekerasan maupun sebaliknya, mereka sering menyimpulkan bahwa pergerakan-pergerakan perlawanan sipil yang berhasil hanyalah anomali sejarah yang berdasarkan pada faktor-faktor unik di negara terkait pada suatu waktu tertentu. Karena dinamika pergerakan-pergerakan ini dianggap kasus-kasus spesifik, mereka tidak bisa dianggap bukti untuk sebuah strategi yang bisa diterapkan masyarakat sipil mana pun dalam pergulatan kekuatan melawan beragam penindas. Sayangnya, para penindas di berbagai penjuru dunia tidak memiliki titik buta ini dalam analisis kekuasaan mereka. Mereka menyadari perlawanan sipil dapat menjadi tantangan terbesar bagi rezim mereka.

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.

Dengan semakin cepatnya konflik-konflik tanpa kekerasan terjadi selama dekade terakhir, semakin penting memperbarui pemahaman mereka yang mendukung perubahan demokratis tentang mengapa perlawanan sipil berhasil. Konflik tanpa kekerasan berhasil dalam berbagai konteks berbeda karena jenis konflik ini didasari dua realitas yang berbeda: rezim otoriter bergantung pada ketaatan luas masyarakat yang sedang ditindas untuk mempertahankan kontrol politik mereka, dan tidak semua orang dalam rezim tersebut sama dalam tingkat ketaatan mereka.

Bagaimana Perlawanan Sipil Berlangsung

Berdasarkan dua realitas ini, para pembangkang sipil menggerakkan masyarakat secara sistematis dengan cara menarik ketaatan politik mereka dan menerapkan taktik-taktik tekanan tanpa kekerasan, seperti pemogokan, boikot, demonstrasi massal, dan lainnya, yang akan mengganggu sistem rezim penindas dan meraih kembali hak, kebebasan dan keadilan. Semakin luas dan beragam orang-orang yang berpartisipasi dalam pembangkangan sipil ini, represi terhadap para pembangkang awal sering kali tidak akan cukup untuk memulihkan kondisi politik seperti semula dan alih-alih dapat menjadi sebuah bumerang bagi sang penindas.

Dengan berlanjutnya pembangkangan, keretakan akan menjalar di segala penjuru pemerintah dan institusi-institusi elite dan penting lainnya, misalnya polisi, militer, dan entitas-entitas media, politik, birokrasi dan ekonomi. Keretakan ini akan berlanjut pada pembelotan politik, dan dengan meluasnya pembelotan politik, akan hancurlah kapasitas inti rezim otoriter yang tergantung pada kontrol terhadap modal, sumber daya manusia dan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, lingkup informasi dan kemampuan menerapkan sanksi. Tanpa rantai perintah yang efektif, sang tiran akan kehabisan pilihan dan terpojok dengan tekanan tanpa kekerasan yang berkelanjutan. Perubahan yang menyeluruh sering menjadi akhir transformasi politik ini.

Kemampuan vs. Kondisi

Dengan semakin seringnya dan semakin luasnya dampak perlawanan sipil, faktor-faktor penentu hasil perlawanan menjadi lebih penting untuk dipelajari. Apakah kondisi sebelum dimulainya perlawanan menentukan pihak mana yang akan menang? Atau apakah kemenangan sebuah pihak lebih ditentukan oleh pilihan-pilihan strategi dan kecakapan berpolitik para pembangkang dalam melawan?

Salah satu aspek penting dari misi Pusat Internasional untuk Konflik Tanpa Kekerasan (*International Center on Nonviolent Conflict*), yang menaungi para penulis, adalah berargumentasi bahwa kemampuan berpolitik yang mumpuni biasanya lebih penting daripada kondisi dalam menentukan hasil perlawanan sipil. Poin argumentasi ini banyak mengundang kritik yang terutama terfokus pada keterbukaan sang penindas

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.

pada tindakan kekerasan. “Perlawanan tanpa kekerasan hanya berefek pada musuh yang tidak berbahaya atau ringan,” adalah kritik yang sering didengar, tapi apa yang cepat dilupakan adalah proses jatuhnya rezim Apartheid di Afrika Selatan, Pinochet di Chile, Marcos di Filipina atau rezim komunis di Polandia. Bukti yang lebih baru dapat dilihat pada kasus Hosni Mubarak di Mesir dan Ben Ali di Tunisia. Tidak satu pun dari rezim-rezim penindas ini dapat diklaim ringan, jinak dan tidak mau menggunakan kekerasan dalam represinya.

Bukti-bukti kualitatif ini didukung oleh analisis kuantitatif. Pada tahun 2008, organisasi Freedom House mengeluarkan hasil penelitian atas berbagai faktor struktural dan pengaruhnya terhadap berbagai perlawanan sipil di 64 proses transisi dari rezim otoriter sepanjang tahun 1975 hingga 2006. Berikut adalah kutipan dari kesimpulan utamanya:

> ... baik faktor politik maupun lingkungan yang diteliti dalam studi ini memiliki dampak signifikan secara statistik terhadap keberhasilan atau kegagalan gerakan perlawanan sipil .... [G]erakan sipil cenderung berhasil di negara-negara miskin yang kurang berkembang, sebagaimana juga di negara-negara maju dan makmur. Studi juga tidak menemukan bukti signifikan bahwa polarisasi etnisitas atau agama memiliki dampak besar pada kemungkinan munculnya oposisi sipil yang kohesif. Jenis rezim nampaknya juga tidak memiliki pengaruh penting terhadap kemampuan gerakan sipil untuk mencapai dukungan luas.[3]

Satu-satunya faktor yang muncul dalam studi ini dan memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap kemunculan dan hasil gerakan perlawanan sipil adalah sentralisasi pemerintah. Penulis melanjutkan bahwa:

> Studi tersebut menunjukkan bahwa tingkat sentralisasi yang tinggi berkorelasi positif dengan munculnya gerakan sipil yang kuat dengan potensi untuk menantang otoritas rezim. Kebalikannya juga tampak benar: semakin besar tingkat desentralisasi pemerintah, semakin kecil kemungkinannya bahwa gerakan mobilisasi masyarakat yang sukses akan muncul.[4]

Jadi, sementara studi tersebut menemukan satu kondisi lingkungan yang mempengaruhi lintasan gerakan perlawanan sipil, keseluruhan temuan mereka sangat melemahkan klaim bahwa kondisi menentukan hasil dari konflik ini.

Tiga tahun kemudian, dalam buku pemenang penghargaan 2011 mereka, *Mengapa Perlawanan Sipil Berhasil: Logika Strategis Konflik Tanpa Kekerasan*, para peneliti Erica Chenoweth dan Maria Stephan menganalisis secara ketat 323 kampanye dengan kekerasan dan tanpa kekerasan yang menantang pemerintah yang sedang berkuasa antara tahun 1900 dan 2006.[5] Temuan mereka menunjukkan terobosan

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.

bahwa kampanye tanpa kekerasan berhasil 53%, sementara hanya 26% kampanye dengan kekerasan berhasil.[6]

Para peneliti tersebut juga menemukan bahwa meskipun represi negara dan faktor struktural lainnya dapat mempengaruhi prospek keberhasilan kampanye perlawanan sipil (walaupun seringkali kurang dari yang biasa diasumsikan—dalam kasus represi negara yang keras, hal itu hanya mengurangi tingkat keberhasilan sekitar 35%), mereka tidak menemukan kondisi struktural yang menentukan hasil gerakan.[7] Setelah mengevaluasi secara menyeluruh data-data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa, "*Bukti menunjukkan bahwa perlawanan sipil sering berhasil terlepas dari kondisi lingkungan yang banyak orang asosiasikan dengan kegagalan kampanye tanpa kekerasan*".[8]

Hasil ini mengungkapkan tidak tepatnya anjuran kebijakan yang konvensional tentang perlawanan sipil. Kemampuan berpolitik yang mumpuni dan pilihan-pilihan strategis seringkali lebih penting daripada kondisi dalam menentukan hasil dari konflik ini. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan bila kita menganggap bahwa keputusan strategis pertama para pembangkang adalah bagaimana cara bertarung. Masuk akal jika kondisi eksternal penting dalam menentukan hasil maka pilihan strategis bagaimana melawan sang penindas tidak akan menjadi masalah, dan tingkat keberhasilan antara konflik dengan kekerasan dan tanpa kekerasan sepanjang waktu dan banyak kasus harus sama.

Akan tetapi, data tidak menyokong kesimpulan itu. Pada periode 1900-2006, angka perlawanan sipil yang berhasil dua kali lipat yang gagal, dan studi kasus baru-baru ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam tingkat keberhasilan tidak berubah secara signifikan.[9] Beberapa pihak dapat mengkritisi hal ini dengan menyatakan bahwa pembangkang sipil memilih pertempuran yang lebih mudah untuk dimenangi, tapi Chenoweth dan Stephan mengantisipasi argumen tersebut dan menunjukkan bahwa, " *... sebagian besar kampanye tanpa kekerasan juga muncul dalam rezim otoriter ... bahkan dalam kondisi oposisi damai, melawan pemerintah dapat berakibat fatal*".[10]

Ekonom pemenang Hadiah Nobel Thomas Schelling telah menyuratkan posisi yang benar lebih dari 50 tahun yang lalu dalam bukunya *Perlawanan Sipil sebagai Pertahanan Nasional: Aksi Tanpa Kekerasan Melawan Agresi.* Inilah yang beliau simpulkan:

> Sang tiran dan rakyatnya berada dalam posisi yang agak simetris. Mereka bisa saja tidak merelakan hal yang ia paling inginkan—yaitu, mereka dapat, kalau saja mereka bisa berorganisasi dengan disiplin dan menolak kolaborasi. Dan sang tiran bisa saja menolak memberikan semua yang mereka inginkan—ia bisa tidak memberikannya dengan menggunakan kekuatan perintahnya… Ini adalah situasi tawar-menawar di mana satu pihak, dengan

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.

> catatan cukup disiplin dan terorganisasi baik, bisa menolak memberikan kebanyakan dari apa yang pihak lain inginkan; dan kita lihat siapa yang akan menang. [11]

Menurut Schelling, taktik yang dipilih oleh para pembangkang sipil memiliki manfaat dan mudarat, seperti halnya taktik yang digunakan oleh lawan otoriter mereka. Pemenang kontestasi politik ini adalah pihak yang berhasil mendistribusikan manfaat dan mudarat secara efisien untuk pihaknya. Pemimpin pihak pembangkang yang mumpuni harus menciptakan perlawanan yang memaksimalkan pembelotan politik, dan secara optimal menerapkan taktik di mana perlawanan yang tidak seberapa dapat menghasilkan pembelotan yang besar. Pihak penindas yang mumpuni, sebaliknya, akan fokus dalam menegakkan ketaatan, sekalipun dengan menggunakan kekerasan, dan secara optimal ingin menggunakan kekerasan minimal untuk mencapai ketaatan maksimal. Keseimbangan pembelotan dan ketaatan secara agregat akan menentukan pemenang.

Daftar Periksa

Jika kemampuan berpolitik yang mumpuni dan pilihan strategis paling berpengaruh pada hasil gerakan perlawanan sipil, maka kita harus dapat mengidentifikasikan kemampuan, keterampilan dan pilihan bersama pada berbagai gerakan yang sama-sama memperlihatkan kesuksesan. Banyak aspek gerakan-gerakan ini yang dapat dianalisis, tapi dari banyaknya variabel kesuksesan, kita dapat menyaringnya dan menyimpulkan tiga kunci sukses gerakan pembangkang sipil, yaitu:

1. Kemampuan untuk menyatukan masyarakat;
2. Perencanaan operasional;
3. Disiplin tanpa kekerasan.

Ketika kemampuan-kemampuan ini hadir mewarnai gerakan perlawanan sipil, ketiga kunci sukses mempersiapkan munculnya tiga tren hebat yang akan berdampak pada keberhasilan gerakan perlawanan sipil, yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlawanan sipil;
2. Mengurangi dampak represi, dan meningkatkan efek bumerang;
3. Meningkatkan pembelotan dari pihak rezim otoriter.

Secara keseluruhan, kami menyebut tiga atribut dan tiga tren ini sebagai sebuah Daftar Periksa. Kami percaya bahwa mencapai atribut-atribut dan tren-tren ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan keberhasilan sebuah gerakan perlawanan sipil. Akan tetapi, Daftar Periksa bukanlah sebuah formula ilmu pengetahuan yang akan menjamin hasil, melainkan sebuah kerangka kerja yang dapat membantu pihak pembangkang mengatur pemikiran dan meningkatkan keefektifannya.

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.

Guna keperluan tujuan ini, satu fungsi dari Daftar Periksa ini adalah untuk memotong potensi disorientasi yang dapat terjadi selama konflik berlangsung. Kompleksitas adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh gerakan perlawanan sipil, dan dalam kabut konflik, sulit untuk mengetahui faktor mana yang paling penting dalam pengambilan keputusan. Kami percaya bahwa jika seorang aktivis atau pengamat eksternal ingin mengevaluasi prospek sebuah gerakan perlawanan sipil, ia bisa menanyakan apakah ketiga kemampuan dan tiga tren pada Daftar Periksa ini memberikan dasar yang kuat untuk mengevaluasi keadaan, kekuatan, kelemahan, dan prospek gerakan saat ini.

Selengkapnya uraian detail mengenai daftar periksa adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk menyatukan masyarakat

Rezim otoriter adalah praktisi lihai dalam hal politik pecah belah atau *devide et impera*, dan para pembangkang harus lebih mahir menciptakan persatuan. Membangun dan memelihara persatuan memang sangat rumit, tapi aspek terpentingnya adalah mengembangkan visi bersama yang inklusif demi perlawanan sipil. Untuk mencapai tujuan ini, pihak pembangkang harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang keluhan, aspirasi, budaya, dan nilai dari berbagai bagian masyarakat yang mereka ingin mobilisasikan. Dari pengetahuan ini, para pembangkang dapat mulai membangun dan mengkomunikasikan sebuah visi yang menarik perhatian masyarakat luas dan memobilisasi masyarakat. Visi yang efektif menyentuh pengalaman pribadi dan perasaan orang biasa dan pada akhirnya memanggil partisipasi mereka dalam perlawanan sipil kolektif.

Aspek penting lainnya dalam membangun kesatuan adalah adanya kepemimpinan dan struktur organisasi yang mempunyai legitimasi. Partisipasi dalam gerakan bersifat sukarela, dan karenanya para pemimpin pihak pembangkang tidak memiliki wewenang memerintah dan mengkontrol secara formal atas populasi yang bermobilisasi. Ini berarti pengambilan keputusan dalam suatu gerakan perlawanan sipil harus dilakukan dengan cara yang dianggap sah oleh publik yang diminta untuk bermobilisasi. Setiap gerakan mengembangkan cara mereka sendiri untuk melakukan ini—beberapa lebih hierarkis, beberapa dengan cara yang lebih terdesentralisasi, dan yang lainnya merupakan kombinasi keduanya dari waktu ke waktu. Terlepas dari kepemimpinan dan struktur organisasi yang tepat, ada berbagai bentuk kepemimpinan dalam gerakan, dan kesatuan melibatkan harmonisasi mereka. Bagi setiap pemimpin nasional tituler atau karismatik, ada banyak pemimpin lokal yang sangat terampil mengembangkan koalisi, negosiasi dan kepentingan gabungan di antara kelompok yang berbeda. Adalah kemampuan pemimpin yang berbeda, pada skala yang berbeda (lokal atau nasional), dari berbagai belahan suatu negara, mewakili kelompok yang berbeda, yang merupakan landasan kerja sama yang menopang persatuan dalam jangka panjang.

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.

Kita dapat melihat bukti dari kedua aspek persatuan ini dalam perlawanan sipil yang digunakan oleh gerakan anti-Apartheid di Afrika Selatan pada dekade 1980-an. Ratusan kelompok masyarakat sipil tumbuh selama dekade tersebut untuk mengadvokasikan tuntutan urban, seperti air bersih dan akses terhadap layanan, sekaligus menyatukannya di bawah visi bersama guna mengakhiri rezim Apartheid dan mencapai rekonsiliasi nasional. Kelompok-kelompok sipil ini, yang bersatu dengan Front Demokratik Bersatu, memiliki pemimpin lokal yang mampu secara efektif memimpin taktik terdesentralisasi (yaitu boikot konsumen) untuk isu-isu lokal, sekaligus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan struktur pengorganisasian yang lebih besar dan kepemimpinan gerakan nasional.

2. Perencanaan operasional

Perlawanan sipil yang efektif jauh lebih kompleks daripada yang umum diasumsikan. Gambaran yang terlintas dalam pikiran orang ketika memikirkan perlawanan sipil adalah protes, tapi aksi itu hanya salah satu dari ratusan taktik yang tersedia. Pimpinan gerakan pembangkang yang paling efektif memahami taktik mana yang harus dipilih, kapan, di mana, bagaimana, dengan siapa harus dilakukan, pada sasaran mana, dan di antara taktik-taktik lain manakah yang harus diurutkan.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara memadai memerlukan perencanaan berdasarkan analisis terperinci tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman gerakan, serta penilaian terhadap lingkungan konflik dan pihak-pihak yang netral atau tidak terikat (termasuk anggota masyarakat internasional) yang dapat mempengaruhi konflik. Dari informasi ini dapat dikembangkan tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka pendek serta rencana operasional yang sesuai. Selagi rencana tersebut berkembang sejalan waktu dan menanggapi kejadian-kejadian di lapangan (seperti halnya semua rencana), proses perencanaan dan pola pikir lebih penting bagi para peserta gerakan pembangkang untuk dikembangkan daripada rencana tertentu itu sendiri.

Untungnya, dalam perencanaan operasional, kita melihat persimpangan yang paling jelas antara kemampuan berpolitik yang mumpuni dan kondisi dalam sebuah konflik. Dasar perencanaan operasional adalah penilaian terhadap kondisi-situasi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan oleh sebuah gerakan. Gerakan pembangkang tersebut kemudian berencana untuk memanfaatkan kondisi yang menguntungkan dan mengatasi, mengubah, atau menghindari kondisi buruk melalui keterampilan dan pilihan strategis.

Contoh perencanaan operasional yang jelas terlihat pada gerakan Solidaritas di Polandia pada dekade 1980an. Memahami betul kekuatan dan kemampuan mereka, para pekerja mengartikulasikan sebuah permintaan yang kuat dan realistis secara politis untuk didirikannya serikat pekerja independen (tapi menahan diri dari menyerukan tujuan yang akhirnya dapat diraih untuk mengakhiri pemerintahan

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.

komunis); memusatkan kekuatan mereka dalam pengorganisasian tenaga kerja dan solidaritas di antara beragam pekerja melawan kerentanan ekonomi lawan mereka dan kurangnya legitimasi; dan memilih taktik efektif untuk menyerang dengan membuang tempat kerja mereka (alih-alih berbaris di luar tempat kerja mereka, yang membuat mereka rentan terhadap penindasan saat mereka mencobanya tahun-tahun sebelumnya). Hal ini diperkuat oleh ketergantungan pekerja terhadap institusi alternative—terutama mesin cetak dan majalah independen—yang telah berkembang selama dekade sebelumnya untuk memfasilitasi komunikasi antarkota. Dengan memilih tujuan strategis, sasaran yang tepat dan taktik yang tepat (pemogokan pendudukan dan penggunaan institusi alternatif) yang berada dalam kemampuan mereka, gerakan Solidaritas secara jeli menangani lingkungan konflik, mengatasi kondisi buruk dan mencapai kemajuan menuju tujuan akhir mereka: sebuah negara demokratis Polandia, yang dicapai pada tahun 1989.[12]

3. Disiplin tanpa kekerasan

Mempertahankan disiplin tanpa kekerasan—yang merupakan kemampuan para pembangkang untuk tetap melawan tanpa kekerasan meskipun diprovokasi—merupakan inti dari dinamika fungsional perlawanan sipil. Dengan disiplin tanpa kekerasan, gerakan memaksimalkan partisipasi warga sipil, meningkatkan biaya represi lawan, meningkatkan kemungkinan bahwa represi akan menjadi bumerang, dan kemungkinan besar akan menyebabkan pembelotan dari berbagai tiang pendukung rezim otoriter. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Chenoweth dan Stephan, manfaat ini secara signifikan berkontribusi pada perbedaan tingkat keberhasilan antara kampanye dengan kekerasan dan kampanye perlawanan sipil.[13]

Mencapai disiplin tanpa kekerasan menuntut agar para pembangkang memiliki keyakinan bahwa perlawanan sipil adalah cara yang efektif untuk mengadili konflik mereka. Informasi tentang bagaimana cara kerja perlawanan sipil dan catatan sejarahnya dapat membantu dalam hal ini, sebagaimana sebuah strategi efektif yang membangun kemenangan tambahan dari waktu ke waktu dan menunjukkan bahwa perlawanan sipil dapat berhasil. Pergerakan menjaga disiplin tanpa kekerasan dapat berlangsung dengan membangun budaya dan norma yang menegakkannya. Misalnya, gerakan Otpor di Serbia yang menggulingkan Slobodan Milosevic secara sistematis melatih anggota baru untuk memahami bagaimana kerja perlawanan sipil dan mengapa penting untuk tetap tanpa kekerasan.

Upaya semacam itu tidak memerlukan sebuah gerakan untuk membuat argumen etis tentang bagaimana tetap melawan tanpa kekerasan, namun para pembangkang harus saling memperkuat diri akan manfaat praktis dari disiplin tanpa kekerasan, sambil mengingat kasus (Suriah menjadi contoh tragis terakhir) di mana ketidaksabaran atau kurangnya kepercayaan terhadap perlawanan sipil dapat menghasilkan sebuah pergeseran ke taktik kekerasan, dengan konsekuensi bencana yang bisa diduga.

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.

4. Meningkatkan partisipasi sipil dalam perlawanan sipil

Tingginya partisipasi sipil dalam perlawanan sipil dapat dibilang sebagai satu-satunya variabel terbesar yang menentukan keberhasilan pergerakan.[14] Ini masuk akal, karena semakin banyak orang menarik persetujuan dan ketaatan dari pemimpin otoriter, maka semakin lemah pula pemimpin otoriter, dan akan menjadi semakin besar juga biaya mereka untuk tetap memegang kendali. Lebih lanjut, kami percaya bahwa meningkatkan partisipasi sipil, juga akan meningkatkan kesempatan bahwa represi akan menjadi bumerang bagi sang tiran. Bukti-bukti kuantitatif menunjukkan bahwa partisipasi sipil yang lebih tinggi, akan meningkatkan kemungkinan terjadinya pembelotan atau pengkhianatan di antara para pendukung musuh.[15]

Gambaran mengenai pentingnya tingkat partisipasi sipil, nampak dalam revolusi 2011 di Mesir dan Tunisia, yang mampu menggalang dukungan luas di berbagai kelompok demografis –pria dan perempuan; kelompok agama dan sekuler; muda, setengah baya, dan tua; pekerja kelas –rendah dan menengah; dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Sebaliknya, gerakan mahasiswa 1989 di China dan Gerakan Hijau 2009 telah memobilisasi jutaan orang dan meraih berita utama, namun sayangnya keduanya tidak mencapai tujuan yang dinyatakan, sebagian karena tidak mengembangkan partisipasi masyarakat luas di luar basis demografi awal mereka.

Mencapai tingkat partisipasi yang tinggi dalam perlawanan sipil adalah hasil dari tiga item pertama pada daftar periksa. Sebuah visi pemersatu membantu membangun kohesi dan menggembleng mobilisasi. Perencanaan operasional menanamkan kepercayaan diri dan memberi serangkaian taktik untuk mengakomodasi toleransi risiko yang bervariasi, waktu yang tersedia, dan kapasitas pengorbanan untuk sebuah gerakan. Strategi yang efektif memberikan pilihan di antaranya bagi orang miskin, kaya, muda, tua, dan semua orang untuk melakukan sesuatu, kecil atau besar, untuk mendukung gerakan tersebut. Disiplin tanpa kekerasan memastikan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi (berlawanan dengan hanya pria berbadan sehat dalam perlawanan bersenjata) dan tindakan tanpa kekerasan lebih cenderung menarik sebagian masyarakat yang luas.

5. Mengurangi dampak represi, dan meningkatnya bumerang

Salah satu alat paling kuat dari kekuasan otoriter adalah kemampuan untuk melakukan represi, dan gerakan yang efektif harus mampu belajar mengenai cara untuk mengurangi dampak represi, sekaligus mendorong peningkatan biaya yang dikeluarkan rezim. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah melalui penilaian risiko yang akurat dan pilihan taktis, karena tidak semua taktik mempertaruhkan represi secara merata.

Sementara tindakan terpusat seperti demonstrasi massa cenderung menghadapi represi, taktik terdesentralisasi seperti boikot konsumen; mogok di rumah, sakit, dan

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.

sekolah; atau tampilan anonim simbol-simbol kecil di tempat-tempat umum; jauh lebih menantang rezim yang menekan. Hal ini terjadi karena para peserta dalam beberapa taktik (boikot konsumen), tidak secara jelas memperlihatkan perlawanan (Anda tidak bisa membedakannya dengan melihat seseorang apakah mereka memboikot sebuah produk atau tidak), atau karena pelaku membaur dan memiliki penolakan yang sama (mogok di rumah mengharuskan polisi melakukan kunjungan rumah ke setiap pekerja, dan peserta yang sakit dapat mengklaim bahwa mereka benar-benar sakit pada hari itu).

Pada tahun 1983 di Chile, pembangkang politik yang menentang kediktatoran Augusto Pinochet harus menemukan cara untuk menghindari penindasannya. Satu dekade penangkapan massal, eksekusi, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa, dimaksudkan supaya orang-orang takut untuk mengatur atau memobilisasi bersama. Pada bulan April, penambang tembaga menyerukan pemogokan di luar Santiago, namun Pinochet mengancam pertumpahan darah dengan mengirimkan pasukannya ke sekitar tambang sebelum pemogokan seharusnya dimulai. Dalam menghadapi penindasan semacam itu, para pemimpin buruh membatalkan pemogokan tersebut dan menyerukan sebuah hari protes nasional, di mana setiap orang yang memprotes rezim tersebut akan bekerja perlahan, berjalan perlahan, menyetir pelan, dan pada pukul 8:00 sore memukul-mukul keras panci dan wajan. Ada partisipasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tindakan ini meluas, dan ini menyebabkan seruan untuk melakukan demonstrasi secara bulanan. Ini adalah langkah besar pertama yang menembus lapisan ketakutan dan atomisasi yang dapat menjadi batu pijakan atau landasan untuk menentang kekuasaan Pinochet. Tindakan tersebut mempunyai tingkat risiko rendah yang dapat diterima bagi peserta, dan juga tidak dapat dihalangi pasukan keamanan Pinochet, yang tidak memiliki jawaban untuk taktik desentralisasi berskala luas semacam itu.

Aspek lain untuk mengurangi dampak represi, atau meningkatkan pembiayaan rezim dan kemungkinan bumerang, adalah dengan melibatkan pengajuan komplain tertentu dalam istilah apolitis (demonstran yang meminta air bersih dan lingkungan aman, yang bertentangan dengan jatuhnya rezim). Selain itu juga dengan membangun garis yang jelas dalam suksesi kepemimpinan, dan menjembatani jarak sosial antara peserta gerakan dan kelompok domestik dan internasional, sehingga represi terhadap gerakan tersebut cenderung menjadi bumerang. Misalnya, ketika blogger Mesir Khaled Said ditarik keluar dari sebuah kafe internet pada tahun 2010, dan dipukuli sampai mati oleh pasukan keamanan, karena mengungkap korupsi, kelompok pembangkang Facebook "*Kami Semua Khaled Said*", membalas usaha pemerintah Mesir untuk mencoba mendevaluasi atau menurunkan citra kehidupan Said. Melalui kehadirannya, mereka memperjelas bahwa Said memiliki banyak kesamaan dengan orang Mesir sehari-hari, sehingga menyebabkan represi menjadi bumerang.

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.

6. Meningkatkan pembelotan dari musuh gerakan

Perlawanan sipil tentunya akan semakin berkembang dari waktu ke waktu, sehingga sering menyebabkan pergeseran loyalitas dan pembelotan atau pengkhianatan di antara pendukung aktif dan pasif musuh. Misalnya, para reformator dan kelompok garis keras di pemerintahan mungkin mulai berjuang secara umum saling menantang untuk memperoleh kendali. Kepentingan ekonomi dapat menekan negara untuk mengakomodasi tuntutan gerakan, sehingga bisnis akan kembali. Fungsionaris rezim seperti tentara, polisi, birokrat, dan lainnya mungkin juga mulai mengubah loyalitas, mungkin karena mereka telah terpengaruh tuntutan gerakan tersebut, merasa jijik dengan rezim, atau karena mereka memiliki anggota keluarga dan teman yang berpartisipasi dalam perlawanan sipil. Bahkan para elit yang simpatik kepada rezim mungkin mulai meragukan keberlanjutannya dan menjadi netral, sehingga tidak mengambil risiko yang berakhir di sisi sejarah yang salah jika perlawanan sipil berhasil.

Dalam Revolusi Oranye di Ukraina pada tahun 2004, para pembangkang sengaja mencari jalur komunikasi dengan pasukan keamanan, bergantung pada korps perwira militer pensiunan sebagai perantara.[17] Seiring waktu, oposisi membuktikan melalui tindakannya bahwa mereka tanpa kekerasan dan masuk akal; Meminta pasukan keamanan untuk melayani dan melindungi kepentingan publik; Menjembatani jarak sosial melalui persaudaraan, slogan, dan tindakan (seperti memberi mawar kepada polisi anti huru hara); mengungkapkan korupsi rezim petahana; dan akhirnya menyebabkan kesetiaan pasukan keamanan bergeser. Ketika tiba saatnya untuk melakukan represi, banyak tentara dan polisi Ukraina akhirnya menjadi netral. Hal ini terjadi juga di Serbia di bawah Milosevic. Tanpa membelot secara terbuka, pasukan keamanan dengan antusias berhenti melaksanakan perintah rezim. Klimaksnya pada gerakan Otpor 5 Oktober, petugas polisi yang bertanggung jawab menyebarkan cairan kimia dari sebuah helikopter ke kerumunan orang Beograd, menolak untuk melakukannya, dengan mengklaim bahwa mereka tidak dapat melihat secara jelas orang banyak, karena cuaca, meskipun cuaca cerah. Kemudian mereka berkomentar, tidak dapat melaksanakan perintah, karena anggota keluarganya mungkin berada di antara para demonstran hari itu.[18]

Apakah didorong oleh persuasi atau kepentingan pribadi, pembelotan seperti ini sering merupakan hasil dari suatu proses jangka panjang yang dikatalisasi oleh gerakan perlawanan sipil. Seperti dua kecenderungan daftar periksa sebelumnya, tren ini muncul dari perwujudan gerakan kesatuan, perencanaan dan disiplin tanpa kekerasan. Data menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi yang beragam, berkorelasi dengan peningkatan kesempatan untuk membelot, dan kesatuan, perencanaan, dan disiplin tanpa kekerasan, semuanya berkontribusi pada partisipasi yang luas dan beragam. Khususnya, disiplin non-kekerasan penting untuk mendorong pembelotan. Selama sebuah gerakan tetap tanpa kekerasan dan menghindari transisi menuju pemberontakan yang kejam (seperti juga kasus tragis di Suriah selama 2011),

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.

maka gerakan tersebut dapat bertahan melawan pada hari lain dan terus membuka kemungkinan pembelotan. Jika target kesetiaan bergeser dalam sebuah rezim tidak terancam oleh pemberontakan yang keras, potensi pembelotan mereka tetap merupakan ancaman lanjutan terhadap kohesi struktur kekuasaan rezim otoriter.

Implikasi bagi Pelaku Eksternal

Daftar periksa ini bukan hanya panduan yang berguna bagi para pembangkang. Konstituensi lain dapat menerapkannya juga untuk memperbaiki kinerjanya dalam kaitan dengan konflik ini.

Misalnya, daftar periksa dapat membantu jurnalis melaporkan secara tanggap mengenai perlawanan sipil. Jika wartawan ingin membuat wawasan yang masuk akal dalam sebuah konflik, daftar periksa tersebut akan menunjukkan, bahwa menempatkan seorang reporter di depan target pembakaran bom Molotov di Kiev pada awal 2014, tidak hanya akan melahirkan spekulasi mengenai apakah kekerasan tersebut memburuk atau tidak? Tetapi juga bicara secara jelas mengenai kekuatan pendorong dalam konflik. Namun, menyelidiki keadaan kesatuan dan perencanaan sebuah gerakan, sumber rincian disiplin tanpa kekerasan, peningkatan partisipasi masyarakat sipil, berkurangnya dampak represi terhadap sebuah gerakan, dan bagaimana pasukan keamanan sepenuhnya mematuhi perintah, apalagi membelot, akan memberikan potongan analisis yang lebih mutakhir. Ditambah lagi ke pemahaman tentang dukungan yang hilang dalam komunitas bisnis, dan tambahan ini memperjelas mengapa Presiden Ukraina Yanukovych melarikan diri pada 21 Februari tahun ini, beberapa jam setelah kekerasan yang dilakukan rezim terburuk menjadi bumerang. Perkembangan seperti itu lebih bisa diprediksi jika kita melihat indikator yang benar sebelumnya.

Jika dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan pada paruh kedua tahun 2011, daftar periksa mungkin mengindikasikan peluang lebih besar untuk memenangkan perlawanan sipil melawan rezim Assad di Suriah. Pergeseran loyalitas yang berlanjut (hanya di luar tentara Sunni) di militer yang jauh dari rezim, bisa dipandang sebagai harapan terbaik untuk meraih kemenangan. Penarikan dukungan oleh anggota komunitas bisnis merupakan indikator lain. Dalam hal ini, dorongan dari Free Syrian Army pada awal tahun 2012 untuk melawan sisa militer Alawite Assad seharusnya dianggap kontra produktif jika tidak merancang sebuah tragedi.

Daftar periksa dapat sangat berguna dalam mengembangkan norma-norma yang mengatur bantuan eksternal untuk gerakan kekuatan masyarakat adat. Misalnya, tiga kemampuan pertama dalam daftar periksa berbasis ketrampilan dan dapat ditambah melalui pertukaran informasi yang kuat. Berdasarkan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, para tiran tidak dapat membatasi arus informasi melintasi perbatasan mereka, atau menghukum warga yang mengirimkan kembali informasi

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.

tersebut kepada pembangkang. Semua enam item pada daftar periksa di atas juga dapat membangkitkan pemikiran tentang jalur untuk inovasi teknologi yang dapat memfasilitasi pengembangan tiga kemampuan dan tiga tren.

Daftar Periksa dan Konflik yang akan Membentuk Masa Depan Kita

Memperjuangkan sebuah lingkungan konflik tanpa kekerasan adalah sesuatu hal yang kompleks, dan pembela sipil—yang membutuhkan koordinasi dengan akar rumput untuk menyusun serangkaian taktik menjadi strategi untuk menang—sering mengalami disorientasi. Rasa takut yang mereka alami, untuk membuat keputusan yang salah dengan kehidupan manusia, dan kebebasan yang dipertaruhkan, dapat menyebabkan kepasifan yang dicari seorang tiran, dan juga memperkuat ilusi kekebalan seorang tiran.

Daftar periksa dapat membantu pembangkang memotong pengertian disorientasi ini, dan mengarahkan jalan ke depan. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa dengan banyaknya variabel dalam permainan, daftar periksa untuk mengakhiri tirani terlalu sederhana, dan bahwa mengevaluasi pengambilan keputusan penting selama konflik di masa depan akan memerlukan perhatian besar pada faktor-faktor yang unik pada waktu dan tempat itu.

Namun, daftar periksa ini tidak meminta untuk mengabaikan faktor-faktor tertentu dalam suatu situasi, tetapi untuk memahami faktor-faktor tersebut dalam konteks kerangka kerja strategis yang lebih luas, yang mengungkapkan bagaimana dan mengapa gerakan perlawanan sipil dapat menang. Atul Gawande, yang telah meneliti pentingnya daftar periksa dalam berbagai konteks lainnya, menulis bahwa:

> Daftar periksa sepertinya bisa membela siapa saja, bahkan yang berpengalaman, melawan kegagalan dalam banyak tugas daripada yang kita sadari. Mereka menyediakan semacam jaring kognitif. Mereka menangkap kekurangan mental yang melekat pada kita semua –kekurangan memori dan perhatian dan ketelitian… .[19]
>
> Dalam kondisi kompleksitas yang sebenarnya—di mana pengetahuan yang dibutuhkan melebihi kenyataan dari setiap individu dan tidak dapat diprediksi lagi... [daftar periksa yang efektif] memastikan hal-hal bodoh tapi penting tidak diabaikan, dan... memastikan orang berbicara dan berkoordinasi... untuk mengelola nuansa dan ketidakpastian yang paling mereka tahu.[20]

Daftar periksa mungkin bukan indikator terakhir mengenai siapa yang akan menang: si tiran atau pemberontak sipil. Namun, daftar periksa dapat menjadi indikator penting dan terus berlanjut untuk memahami bagaimana tuntutan masyarakat akan kebebasan dapat melawan pertahanan atau kekuatan sistem otoriter. [ ]

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.

Catatan Kaki

[1] Berdasarkan penelitian oleh Chenoweth dan Maria Stephan, yang mengidentifikasi 105 kampanye perlawanan sipil yang mengupayakan perubahan pemerintahan di negara dan wilayah di seluruh dunia di antara 1900-2006.

Chenoweth, Erica, dan Maria Stephan. 2011. *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict*. New York: Columbia University Press. hal. 6.

NAVCO 1.1 data data tersedia pada:
http://www.du.edu/korbel/sie/research/chenow_navco_data.html.

[2] Berdasarkan 67 transisi demokrasi yang dianalisis antara tahun 1972-2005 dalam penelitian ini *How Freedom is Won: From Civic Resistance to Durable Democracy*. Penulis menemukan bahwa:

"*Kekuatan perlawanan sipil adalah faktor kunci dalam menggerakkan 50 dari 67 transisi, atau lebih dari 70 persen negara di mana transisi dimulai saat sistem diktator runtuh dan / atau negara baru bangkit dari disintegrasi negara multinasional. Dari 50 negara di mana resistansi sipil merupakan strategi kunci (yaitu, baik negara di mana ada transisi yang didorong oleh kekuatan sipil atau negara dimana terjadi transisi campuran yang melibatkan masukan signifikan dari kekuatan sipil dan pemangku kepentingan), tidak ada negara Bebas, 25 negara adalah Sebagian bebas, dan 25 negara Bukan Negara Bebas. Hari ini [tahun 2005], tahun setelah transisi 32 negara ini Bebas, 14 Bebas Sebagian, dan hanya 4 yang Tidak Bebas*."

Ackerman, Peter, dan Adrian Karatnycky. 2005. *How Freedom is Won: From Civic Resistance to Durable Democracy*. Washington, DC: Freedom House. Hal. 6-7

[3] Marchant, Eleanor, Adrian Karatnycky, Arch Puddington, dan Christopher Walter. 2008. Enabling Environments for Civic Movements and the Dynamics of Democratic Transition. Freedom House special report. 18 Juli. hal. 1

[4] *Ibid*. hal. 1

[5] Chenoweth, Erica, dan Maria Stephan. 2011. *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict*. New York: Columbia University Press. hal. 6

[6] *Ibid.* hal. 9

[7] *Ibid.* hal. 68

[8] Ibid. hal. 62

[9] Chenoweth, Erica. 2014 Trends in Civil Resistance and Authoritarian Responses. The Atlantic Council Future of Authoritarianism Project. 15 April.

[10] Chenoweth, Erica, dan Maria Stephan. 2011. *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic*

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.

of Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press. hal. 66

[11] Thomas C. Schelling. 1968. "Some Questions on Civilian Defence," in Adam Roberts, ed., *Civilian Resistance as a National Defence: Non-violent Action Against Aggression*. Harrisburg, PA: Stackpole Books. hal. 304.

[12] Ackerman, Peter dan Jack DuVall. 2000. *A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict*. London: St. Martin's Press/Palgrave Macmillan. hal. 113-174

[13] Chenoweth, Erica, dan Maria Stephan. 2011. *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict*. New York: Columbia University Press. Pp. 30-61

[14] *Ibid.* hal. 30-61

[15] *Ibid.* hal. 46-49

[16] *A Force More Powerful*. Dir. Steve York. York Zimmerman. 2000. Film.

[17] Binnendijk, Anika Locke, dan Ivan Marovic. 2006. Power and Persuasion: Nonviolent Strategies to Influence State Security Forces in Serbia (2000) and Ukraine (2004). *Communist and Post-Communist Studies* 39, no. 3 (September). hal. 411-429.

[18] Wawancara dengan Nebojsa Covic*, Vecernje Novosti*, 2 Oktober 2010.

[19] Gawande, Atul. 2009. *The Checklist Manifesto: How to Get Things Right*. New York: Picador. hal. 47

[20] *Ibid.* hal. 79

Bab ini muncul dalam: Mathew Burrows dan Maria J. Stephan (eds.), Is Authoritarianism Staging a Comeback?, Washington, DC: The Atlantic Council, 2015.